



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Juni 2012

Halaman: 5

Transparansi Informasi

Tingkatkan "Good Governance"

JOGJA--Transparansi informasi akan meningkatkan *good governance* atau pemerintahan yang baik.

"Salah satu upaya melakukan transparansi adalah dengan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat," ujar Walikota Jogja, Haryadi Suyuti dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Optimalisasi Peran Media Massa Dalam Menjembatani Kebijakan Daerah' yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Komunikasi Politik, Deputi Seswapres Bidang Politik Bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di UMY, Senin (11/6).

Menurut Haryadi, saat ini pemerintah Kota Yogyakarta memiliki program dan acara khusus di media massa. Dalam program itu masyarakat bisa menyampaikan keluhan, saran, mau pun aspirasinya langsung kepada pemerintah.

Akses komunikasi yang terbuka, adalah salah satu upaya membangun *trust* atau kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Sebab dalam pembangunan, masyarakat merupakan obyek dan pemerintah adalah fasilitator.

"Oleh karena itu, *trust* dari masyarakat sangat penting untuk memulai komunikasi yang baik. Harapannya, setelah tercipta sebuah proses komunikasi, maka akan ada informasi, yang kemudian melahirkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam

pembangunan," jelasnya.

Sementara praktisi media, Octo Lampito mengungkapkan, ada banyak hal tentang media yang harus diketahui oleh para humas pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal pemberitaan terkait kebijakan pemerintah daerah.

Dicontohkannya, media punya kebijakan masing-masing, misalnya kebijakan editorial. Media juga memiliki gatekeeper yang akan ikut menentukan konten pemberitaan.

"Kadang-kadang, harus dapat dimengerti bila berita yang muncul tidak selalu sama persis dengan apa yang diinginkan pihak humas. Untuk itu, penting sekali bagi para Humas Pemd

untuk memahami masing-masing kebijakan media yang ada," jelasnya.

Rektor UMY, Dasron Hamid menambahkan, di era reformasi dan demokrasi ini, salah satu sarana komunikasi yang potensial adalah media massa. Dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, serta ditunjang kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin pesat, media massa dapat mengabarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, menyuarakan opini, analisis serta harapan masyarakat secara obyektif, cepat dan akurat. "Sehingga dapat menjadi masukan bagi pmda atau pusat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan," ujarnya.

Media massa, lanjut rektor tidak sekedar penyebar informasi namun memiliki tanggungjawab untuk aktif dalam menciptakan hubungan dan integrasi. Dalam masyarakat, media bergerak ditandai oleh adanya penyebaran kekuasaan yang diberikan kepada individu, kelompok dan kelas sosial yang secara nyata tidak merata.

"Diharapkan media dapat menyajikan dukungan terhadap kebijakan daerah yang semakin berpihak pada rakyat, mensejahterakan rakyat, bersikap aspiratif sesuai dengan kebutuhan dan kehendak rakyat, serta sinkron dan harmonis secara hierarkis," imbuhnya. (ptu)



CINDERAMATA--Walikota Jogja, Haryadi Suyuti mendapatkan cinderamata dalam (FGD) 'Optimalisasi Peran Media Massa Dalam Menjembatani Kebijakan Daerah' di UMY, Senin (11/6).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005